

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN

a. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2016 Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana dalam membantu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang perhubungan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- e. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi;
- f. penyelenggaraan manajemen transportasi;
- g. pengelolaan manajemen perparkiran;
- h. pengelolaan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
- i. penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan;
- j. pengendalian teknis di bidang perhubungan;
- k. penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi di bidang perhubungan;
- l. penyusunan kebijakan pengujian dan pemeriksaan sarana transportasi;
- m. penyelenggaraan kesekretariatan Dishub;
- n. pengelolaan rekomendasi teknis di bidang perhubungan;
- o. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretaris dan kepala bidang. Tugas dan fungsi sekretariat dan bidang sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dan program. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada Sekretariat;

- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja bidang secara terpadu;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
- d. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- g. pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan Dishub;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

B. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan bidang angkutan darat, keterminalan, angkutan laut, dan kepelabuhanan serta Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Bidang Angkutan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang angkutan;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang angkutan;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan angkutan darat dan keterminalan;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan angkutan laut, kepelabuhanan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- e. pelaksanaan rekomendasi teknis di bidang angkutan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Angkutan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor, penerangan jalan umum, dan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada bidang keselamatan dan teknik sarana;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang keselamatan dan teknik sarana;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penerangan jalan umum;
- e. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang;
- f. pelaksanaan rekomendasi teknis dibidang keselamatan dan teknik sarana;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengendalian, pengawasan lalu lintas dan perparkiran. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:

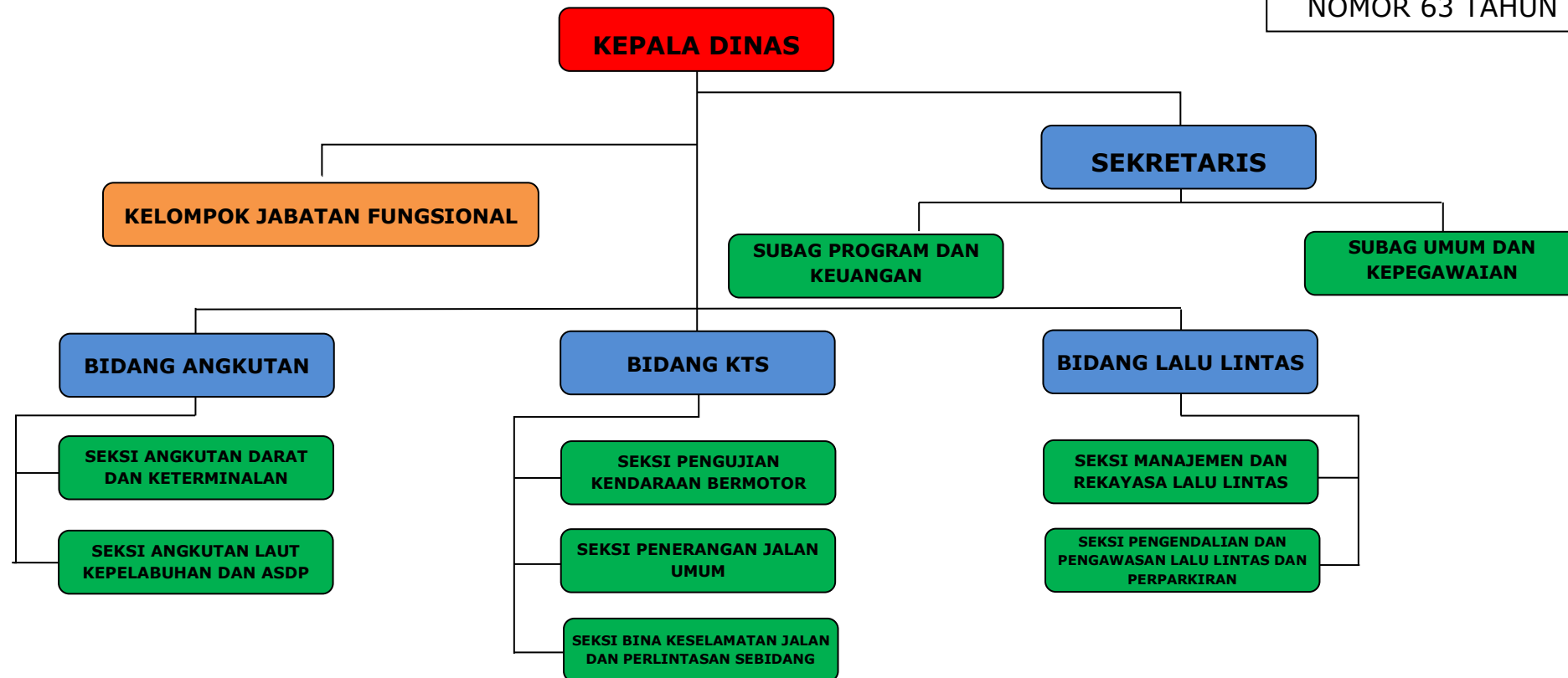
- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Lalu Lintas;
- b. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di Bidang Lalu Lintas;
- c. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- d. pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pernantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan lalu lintas, dan perparkiran;
 - e. pelaksanaan rekomendasi teknis di Bidang Lalu Lintas;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Lalu Lintas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Struktur Organisasi
- a. Kepala Dinas,
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Angkutan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Angkutan Darat dan Keterminalan; dan
 - 2) Seksi Angkutan Laut, Kepelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
 - d. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 2) Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
 - 3) Seksi Bina Keselamatan Jalan dan Perlintasan Sebidang.
 - e. Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 - 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas dan Perparkiran.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG

BERDASARKAN PERBUP
NOMOR 63 TAHUN 2016

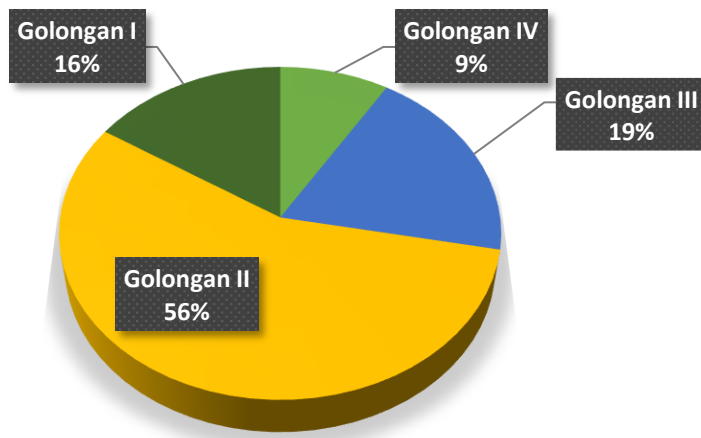


c. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan / karyawati Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2017 berjumlah 57 orang dengan perincian sebagai berikut:

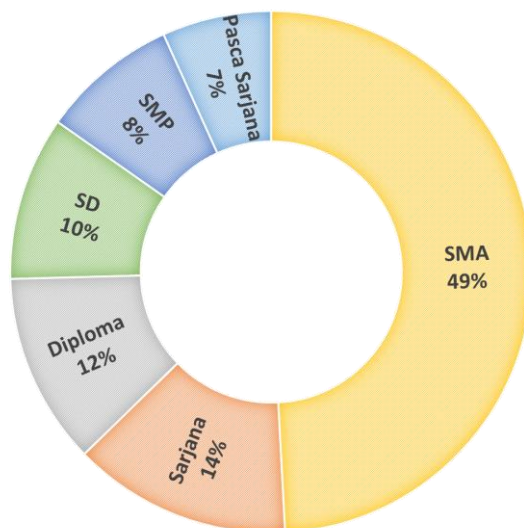
i. Menurut golongan

- a. Golongan IV : 5 orang
- b. Golongan III : 11 orang
- c. Golongan II : 32 orang
- d. Golongan I : 9 orang



ii. Menurut Pendidikan

- a. Pasca Sarjana : 4 orang
- b. Sarjana : 8 orang
- c. Diploma : 7 orang
- d. SMA : 29 orang
- e. SMP : 5 orang
- f. SD : 6 orang



iii. Menurut Eselon

- | | | | |
|----|------------|---|----------|
| a. | Eselon II | : | 1 orang |
| b. | Eselon III | : | 4 orang |
| c. | Eselon IV | : | 9 orang |
| d. | Staf | : | 43 orang |

Jumlah karyawan / karyawan Non PNS di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2017 berjumlah 15 orang dengan perincian sebagai berikut:

i. Menurut Pendidikan

- | | | | |
|----|---------|---|---------|
| a. | Sarjana | : | 3 orang |
| b. | Diploma | : | - |
| c. | SMA | : | 3 orang |
| d. | SMP | : | 3 orang |
| e. | SD | : | 6 orang |

Jumlah karyawan / karyawan kontrak di Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2017 berjumlah 75 orang.

Rekapitulasi jumlah pegawai dinas perhubungan Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel dibawah :

TABEL REKAPITULASI JUMLAH PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

NO	BAGIAN/BIDANG	Gol. IV				JML	Gol. III				JML	Gol. II				JML	Gol. I				JML	JUMLAH PNS	GENDER		HONORER			JML	JUMLAH
		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d			L	P	PP31	THL	Kontrak		
1	SEKRETARIAT	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	6	3	9	-	-	-	-	-	12	11	1	2	-	13	15	27
2	BIDANG ANGKUTAN	1	-	-	-	1	1	1	1	1	4	1	1	10	-	12	-	1	7	-	8	25	25	-	1	-	3	4	29
3	BIDANG KTS	1	-	-	-	1	-	1	-	2	3	1	1	3	1	6	-	1	-	-	1	11	11	-	2	-	59	61	72
4	BIDANG LALU LINTAS	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	2	-	5	-	-	-	-	-	8	7	1	2	-	2	4	12
	JUMLAH	3	1	-	-	4	1	2	2	6	11	3	4	21	4	32	-	2	7	-	9	56	54	2	7	-	77	84	140

d. Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

a. Sarana

➤ Tanah dan Gedung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Gedung kantor Dinas Perhubungan	5.890 m ²
2.	Bangunan Terminal Bandar	600 m ²
3.	Bangunan Terminal Banyuputih	18.430 m ²
4.	Bangunan Pangkalan Penundan	12.500 m ²
5.	Bangunan Terminal Bawang	3.780 m ²
6.	Bangunan Terminal Limpung	6.440 m ²

➤ Kendaraan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Kendaraan Roda 4	6 unit
2.	Truk crane	1 unit
3.	Truk + attachment	1 unit
4.	Kendaraan bermotor angkutan barang lain-lain	1 unit
5.	Sepeda motor	34 unit

b. Prasarana

➤ Peralatan

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Alat bengkel dan alat ukur	53 unit
2.	Alat kantor dan rumah tangga	479 unit
3.	Alat studio dan alat komunikasi	54 unit

➤ Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Jalan dan jembatan
2. Bangunan air / irigasi
3. Instalasi listrik
4. Jaringan Listrik

e. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.333.314.068,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 28.102.147.124,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.3
Anggaran Belanja 2017
Dinas Perhubungan Kabupaten Batang

No.	Jenis Pembiayaan	Nilai (Rp.)
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.333.314.068,00
2	Belanja Langsung :	Rp. 28.102.147.124,00
	- Belanja Pegawai	Rp. 473.770.000,00
	- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 23.497.888.624,00
	- Belanja Modal	Rp. 4.130.488.500,00
	Jumlah	Rp. 32.435.461.192,00

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain :

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
2. Kekurangan sumber daya manusia terampil, baik dari kualitas maupun jumlah.
3. Anggaran APBD yang terbatas, sehingga berdampak pada pelayanan yang kurang optimal.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Kurangnya pelatihan / diklat bagi sumber daya manusia perhubungan.
2. Kekurangan sumber daya manusia yang terampil dibidang perhubungan.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pekerjaan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP

Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja tersebut disusun berdasarkan

dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Batang tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2017 dan umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta mendorong penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance).

D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKjIP

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKjIP DINAS PERHUBUNGAN

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Menyajikan ikhtisar sasaran utama yang ingin diraih pada tahun 2017, kaitan sasaran tersebut dengan visi – misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Realisasi Anggaran

Menyajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Lampiran – lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja tahun 2017 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2012 - 2017 yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang periode tahun 2012 - 2017 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang adalah "Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan jasa perhubungan yang handal, dinamis, sinergis serta berdaya saing dalam rangka penguatan ekonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang yang berkembang".

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, dijabarkan lebih operasional ke dalam 1 tujuan dan 9 sasaran, yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan dan pelaksanaan 11 program serta 43 kegiatan. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

1. Mewujudkan sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dalam menciptakan dan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa guna mendorong pengembangan wilayah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
	Pemetaan dan keterjangkauan transportasi	a. Jumlah arus penumpang angkutan umum
		b. Rasio ijin trayek
		c. Jumlah uji kir angkutan umum
		d. Pelabuhan Laut
		e. Terminal Type C
		f. Angkutan Darat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
		g. Kepemilikan KIR angkutan Umum
		h. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
		i. Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (PJU)

B. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Batang telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2012 – 2017.

Rincian penetapan kinerja Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Batang tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan
Kabupaten Batang Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemetaan dan keterjangkauan transportasi	a. Jumlah arus penumpang angkutan umum	9.827.325
		b. Rasio ijin trayek	0,6
		c. Jumlah uji kir angkutan umum	1.078
		d. Pelabuhan Laut	1
		e. Terminal Type C	2
		f. Angkutan Darat	1.014
		g. Kepemilikan KIR angkutan Umum	539
		h. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	65

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		i. Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (PJU)	20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja (PK) Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batang. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala	Kategori
Lebih dari 100%	Sangat Berhasil/sangat baik
75 s/d 100%	Cukup Berhasil/cukup baik
55 s/d 75%	Kurang Berhasil/kurang baik
Kurang dari 55	Tidak Berhasil/tidak baik

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang untuk mengetahui capaian kinerja nyata terkendala oleh beberapa hal antara lain belum optimalnya perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja serta beberapa indikator belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat.

Gambaran keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2017, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2017

No	Uraian Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemetaan dan keterjangkauan transportasi			
	a. Jumlah arus penumpang angkutan umum	9.827.325	9.342.628	95,1
	b. Rasio ijin trayek	0,6	0,6	100,0
	c. Jumlah uji kir angkutan umum	1.078	1.180	109,5
	d. Pelabuhan Laut	1	1	100,0
	e. Terminal Type C	2	2	100,0
	f. Angkutan Darat	1.014	1.014	100,0
	g. Kepemilikan KIR angkutan Umum	539	590	109,5
	h. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	65	65	100,0
	i. Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (PJU)	20	20	100,0
	Rata-rata capaian IKU			101,5

Secara kumulatif rata-rata capaian IKU yang merepresentasikan tercapainya sasaran strategis pada tahun 2017 adalah sebesar 101,5% atau kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batang pada tahun 2017 adalah Sangat Berhasil / sangat baik. Adapun keberhasilan atau hambatan yang terjadi diuraikan dalam analisis hasil pengukuran kinerja.

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam Renstra, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya.

Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Batang pada tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. Tujuan mewujudkan sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dalam menciptakan dan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa guna mendorong pengembangan wilayah.

Tujuan tersebut mencakup 1 sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Sasaran pemetaan dan keterjangkauan transportasi

Capaian kinerja sasaran pemetaan dan keterjangkauan transportasi tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Pengelolaan Keuangan SKPD

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan mebeleur
 - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
 - Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
 - Pemeliharaan rutin / berkala peralatan pengujian kendaraan bermotor
- c. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan :
 - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - Pembinaan Disiplin Pegawai
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
 - Pendidikan dan pelatihan formal
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :
 - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan :
 - Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan
 - Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
- g. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan :
 - Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan
 - Rehabilitasi / pemeliharaan perlengkapan jalan
- h. Pogram peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan :
 - Kegiatan penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang
 - Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
 - Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan
 - Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
- i. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, dengan kegiatan :
 - Pembangunan Pelabuhan dan Akses Jalan
- j. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, dengan kegiatan :
 - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

- Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)
 - DAK Bidang Transportasi Keselamatan Transportasi Darat - Pengadaan Rambu rambu Lalu Lintas (DAK)
- k. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor, dengan kegiatan :
- Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

No	Uraian Sasaran	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pemetaan dan keterjangkauan transportasi, dengan IKU:					
	1. Jumlah arus penumpang angkutan umum	9.827.325	9.342.628	98,06	95,1	-2,96
	2. Rasio ijin trayek	0,6	0,6	92,31	100,0	7,69
	3. Jumlah uji kir angkutan umum	1.078	1.180	100,7	109,5	8,8
	4. Pelabuhan Laut	1	1	100	100,0	0
	5. Terminal Type C	2	2	100	100,0	0
	6. Angkutan Darat	1.014	1.014	101,4	100,0	-1,4
	7. Kepemilikan KIR angkutan Umum	539	590	100,7	109,5	8,8
	8. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	65	65	100	100,0	0

No	Uraian Sasaran	Target	Realisasi		% Capaian	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	9. Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (PJU)	20	20	-	100,0	-
	Rata-rata capaian sasaran			99,15	101,57	2,4

Capaian kinerja sasaran pemetaan dan keterjangkauan transportasi sebesar 101,57%, maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 9 (sembilan) indikator kinerja. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja tersebut, capaian indikator Jumlah uji kir angkutan umum dan Kepemilikan KIR angkutan umum melebihi target, sedangkan capaian indikator kinerja Rasio ijin trayek, Pelabuhan Laut, Terminal type C, Angkutan darat, Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) dan Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (PJU) telah memenuhi target. Jumlah arus penumpang angkutan umum belum memenuhi target. Tidak tercapainya target Jumlah arus penumpang angkutan umum karena masyarakat lebih memilih untuk memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut mengalami kenaikan 2,4%.

Sampai dengan tahun 2017, capaian kinerja sasaran pemetaan dan keterjangkauan transportasi adalah 98,63%, capaian kinerja tersebut belum memenuhi target akhir periode RPJMD tahun 2012 – 2017 sebesar 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang telah melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Batang. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan kegiatan dan program adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Program pelayanan administrasi perkantoran			
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	6.848.004	5.043.000	73,64
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.553.778.500	17.324.559.432	98,69

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	185.000.000	180.452.000	97,54
4.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	13.000.000	12.866.575	98,97
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	75.000.000	74.810.000	99,75
6.	Penyediaan alat tulis kantor	46.254.000	44.832.500	96,93
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	249.030.000	220.569.625	88,57
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	530.000.000	521.298.400	98,36
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.500.000	4.488.000	99,73
10.	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000	34.504.000	98,58
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	125.000.000	121.432.656	97,15
12.	Kegiatan pengelolaan keuangan SKPD	90.000.000	89.974.000	99,97
II.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
1.	Pembangunan gedung kantor	51.110.000	50.401.300	98,61
2.	pengadaan Kendaraan dinas / operasional	575.000.000	537.530.000	93,48
3.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100.000.000	99.560.000	99,56
4.	Pengadaan peralatan gedung kantor	68.400.000	67.610.000	98,85
5.	Pengadaan mebeleur	36.500.000	36.190.000	99,15

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	78.550.000	78.032.700	99,34
7.	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	394.800.000	384.928.930	97,50
8.	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	59.500.000	59.493.500	99,99
9.	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	12.000.000	11.985.000	99,88
10.	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	5.000.000	4.983.000	99,66
11.	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan pengujian kendaraan bermotor	323.000.000	314.268.600	97,30
III.	Program peningkatan disiplin aparatur			
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	115.000.000	113.957.000	99,09
IV.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000	27.000.000	54,00
V.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	0	0
VI.	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan			
1.	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	90.000.000	85.813.000	95,35
2.	Sosialisasi kebijakan dibidang perhubungan	160.000.000	158.933.500	99,33

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
VII.	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ			
1.	Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan	497.475.000	489.968.100	98,49
2.	Rehabilitasi / pemeliharaan perlengkapan jalan	1.762.690.500	1.676.742.050	95,12
VIII.	Program peningkatan pelayanan angkutan			
1.	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	81.580.000	77.659.800	95,19
2.	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	384.500.000	366.309.064	95,27
3.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir / juru mudi / awak kendaraan angkutan umum teladan	50.000.000	45.905.000	91,81
4.	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	90.700.000	70.412.298	77,63
5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	268.862.000	190.788.500	70,96
6.	Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan	100.000.000	93.110.200	93,11
IX.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			
1.	Pembangunan pelabuhan dan akses jalan	2.259.332.500	1.502.518.200	66,50
X	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas			

No.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	215.500.000	206.068.400	95,62
2.	Pengadaan marka jalan	75.000.000	74.177.550	98,90
3.	Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN)	100.000.000	44.386.616	44,39
X.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor			
1.	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	198.090.000	176.234.800	88,97
2.	Pelaksanaan Uji Petik Kelaikan Kapal	170.146.620	142.652.200	83,84
XI.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			
1.	Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur	81.950.0000	77.880.780	95,03
TOTAL		28.102.147.124	26.578.780.996	94,58

Dari tabel realisasi anggaran diatas dapat dilihat capaian kinerja anggaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Batang sebagian besar berada pada kisaran antara 90% - 100% dan sebagian berada pada kisaran 50% - 80%, dengan rata-rata pencapaian 94,58%.

Penyerapan anggaran terendah ada pada kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yaitu dengan realisasi 0%. Hal tersebut karena adanya aturan untuk kegiatan yang melibatkan tim intern OPD tidak diberikan honor kegiatan. Sedangkan realisasi tertinggi ada pada kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor yaitu sebesar 99,99%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Batang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Batang menyadari bahwa dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented Government).

Simpulan hasil pengukuran kinerja tahun 2017 dan langkah yang akan ditempuh dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Simpulan :

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja Tahun 2017 dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Batang sangat baik yakni dengan persentase 101,57%.

Langkah yang akan dilakukan :

1. Melanjutkan progres yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.
2. Membuat perencanaan program dan kegiatan untuk mendorong pencapaian target indikator sasaran.
3. Meningkatkan kinerja agar sasaran yang akan dicapai paling tidak sama atau bahkan bisa melebihi dari tahun sebelumnya.